

Judul : Komitmen Rp 7 Triliun untuk pemilu 2024
Tanggal : Sabtu, 04 Juni 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Komitmen Rp 7 Triliun untuk Pemilu 2024

Alokasi anggaran untuk membiayai tahapan pemilu belum bisa disahkan. Ini karena PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024 yang jadi dasar pengalokasian anggaran belum juga ditetapkan.

JAKARTA, KOMPAS — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat berkomitmen menyetujui kebutuhan anggaran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk membiayai tahapan pemilu di tahun 2022 sebesar Rp 7 triliun. Namun, persetujuan penetapan anggaran belum bisa dilakukan karena menunggu Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024 ditetapkan. Peraturan KPU itu-lah yang menjadi dasar penyusunan mata anggaran untuk membiayai tahapan pemilu.

Hingga Jumat (3/6/2022), Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024 belum juga ditetapkan. Rapat konsultasi dengan Komisi II DPR dan pemerintah sebagai prasyarat penetapan PKPU sudah dua kali diundur dan belum ada kepastian kapan akan digelar. Para pimpinan Komisi II DPR hanya menyampaikan bahwa rapat dengan pendapat dalam rangka konsultasi rancangan PKPU akan dilaksanakan setelah KPU bertemu Ketua DPR Puan Maharani pada Senin (6/6).

Meski begitu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memastikan, Banggar akan memberikan dukungan penuh, terutama terkait pengalokasian anggaran pemilu. Sebab, Pemilu 2024 merupakan agenda strategis nasional.

Said menyebut, Banggar DPR telah sepakat untuk mengalo-

kasikan anggaran sebesar Rp 7 triliun untuk membiayai tahapan pemilu untuk 2022. "Anggaran Rp 7 triliun tersebut untuk KPU, Bawaslu, dan berbagai program kerja persiapan Pemilu 2024 yang perlu dilakukan pada tahun 2022," katanya.

Namun, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu tidak bersedia merinci jumlah anggaran yang dialokasikan untuk KPU dan besaran anggaran untuk Bawaslu. Beberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno menyampaikan, pemerintah telah memberikan pagu anggaran Rp 2,45 triliun untuk penyelenggaraan tahapan pemilu pada 2022. Adapun kebutuhan anggaran yang diajukan KPU sebesar Rp 8,06 triliun. Artinya, masih ada kekurangan sekitar Rp 5,6 triliun.

Sementara meskipun sudah ada komitmen bersama, Banggar belum bisa mengesahkan anggaran pemilu. Banggar masih harus menunggu pembahasan rancangan PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal pemilu oleh Komisi II, pemerintah, dan penyelenggara pemilu. "Dari rapat Komisi II DPR, Pemerintah, KPU, dan Bawaslu tentu akan ada kesepakatan tahapan apa saja yang perlu dipersiapkan sebagai rangkaian kegiatan menuju pemilihan di tahun 2024 nanti," kata Said.

Wakil Ketua Banggar DPR Syarif Abdullah menambahkan,

anggaran yang disetujui harus berdasarkan kebutuhan riil dari KPU dan Bawaslu. Karena itu, kepastian besaran anggaran pemilu akan ditetapkan setelah tahapan, program, dan jadwal pemilu ditetapkan. Selain itu juga masih diperlukan pembahasan mendalam oleh fraksi-fraksi di DPR.

Titik temu

Sampai saat ini, anggaran Pemilu 2024 secara keseluruhan masih dibahas di Komisi II DPR. Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal mengungkapkan, anggaran pemilu yang diajukan oleh KPU Rp 76,6 triliun sudah disepakati dalam rapat konsinyering bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, 13-15 Mei lalu. Namun, jumlah tersebut bisa saja berubah karena masih dilakukan pembahasan. Sementara usulan anggaran Bawaslu sebesar Rp 22 triliun masih dibahas bersama fraksi-fraksi di Komisi II.

Anggota KPU, Yulianto Sudrajat, menjelaskan, anggaran pemilu Rp 76,6 triliun dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan tahapan pemilu selama tiga tahun. Anggaran sebesar Rp 8 triliun, antara lain, untuk biaya tahapan tahun 2022 sebesar Rp 23,85 triliun serta 2023 dan 2024 sebesar Rp 44,73 triliun.

"Anggaran ini yang sudah ada titik temu dalam konsinyering bersama Komisi II dan pemerintah," kata Yulianto.

Dari jumlah tersebut, Rp 63,4 triliun akan digunakan untuk tahapan pemilu, honor badan *ad hoc*, logistik, serta sosialisasi dan pendidikan pemilih. Sementara Rp 13,25 triliun lainnya digunakan untuk kegiatan pendukung tahapan. Salah satunya untuk pembangunan serta perbaikan gedung kantor dan gedung KPU di daerah. Selain itu, juga untuk uang kehormatan komisioner, gaji, dan tunjangan kinerja pegawai KPU seluruh Indonesia dan belanja operasional kantor KPU seluruh Indonesia.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, Bawaslu mengajukan anggaran sebesar Rp 28,241 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 22,496 triliun digunakan untuk tahapan pemilu dan Rp 5,75 triliun sisanya untuk operasional dan kebutuhan non-tahapan.

Kebutuhan anggaran Bawaslu tahun 2022 sebesar Rp 3,7 triliun, tetapi pagu yang diberikan Rp 1,9 triliun. Alhasil, Bawaslu masih kekurangan anggaran Rp 1,7 triliun.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mengatakan, KPU dan Bawaslu mesti meyakinkan pemerintah dan DPR terkait anggaran yang diusulkan. KPU dan Bawaslu mesti memberikan alasan yang kuat dan rasional mengapa mengajukan anggaran sebesar itu. (SYA/PDS)